

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN

Erwan
Pemerintah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

ABSTRACT

National program development of socio-economic infrastructure is a program that aims to accelerate the economic development of rural communities based on local resources, reduction of disparities between regions, reducing poverty, improving the management of local governments at the district, sub-district and village as well as the strengthening of local institutions at the village level. The purpose of this study are: (1) How is the effectiveness of implementation of PNPM-PISEW program in strategic area of Tabalong; (2) Finding the factors that supported and obstacles of the implementation of the PNPM-PISEW, and (3) Formulate an alternative model that can be applied to community empowerment in Tabalong. This research done by qualitative approach by using formative evaluation to measure the effectiveness of the implementation of PNPM-PISEW program. The data collected through interview and documentation. Data analysis by descriptive analysis. The results of research shown that PNPM-PISEW implementation is not optimum yet. So this policy outcome is moderate effectively. Some factors may be identified as supporting like as society obedience; local government support and public participatory, so the obstacle factors like as lack of sinergisity and lack of individual and social capacity of target group. The positive outcome of the PNPM-PISEW in Strategic Areas Tabalong are the increase of income, increase of employment opportunities, and increase the capacity of the local government .

Key word: *Community, Empowerment, Execution, Effectiveness, PNPM-PISEW*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 28,55 juta jiwa atau 11,47% dari 248,8 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Belum meratanya pembangunan, terutama kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dan lapangan pekerjaan di perdesaan menyebabkan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran. Persentase kemiskinan ini terdiri dari 10,63% penduduk perkotaan dan 17,92% penduduk perdesaan (BPS, 2016). Sedangkan angka pengangguran pada tahun yang sama mencapai sebesar 7,39 juta jiwa dari total angkatan kerja sebesar 118,19 juta jiwa.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pro rakyat, seperti program penanggulangan kemiskinan berupa penyaluran beras untuk orang miskin atau dikenal sebagai Program Raskin, berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti program Jamkesmas, Jamkeskin, Program Bantuan Langsung Tunai, dan berbagai program social safety nett lainnya. Demikian juga terdapat program penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan proyek padat karya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, seperti halnya program PDMDKE, Program IDT, Program P3DT, dan juga program pengembangan kecamatan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau disingkat PNPM-PISEW merupakan program yang lain lagi, di mana

telah melakukan tahap perencanaan program, baik di tingkat pusat maupun daerah pada tahun 2008. Secara teknis, guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan PNPM-PISEW, arah pengembangannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar perdesaan, pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS), meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui pengembangan strategi pelatihan pengelolaan pembangunan secara administratif serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keberhasilan PNPM-PISEW (RISE I) yang telah dilaksanakan selama 5 tahun (2010-2014) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung melalui penyerapan tenaga kerja di 2.355 desa, 237 kecamatan dan 34 KSK. Alokasi sebesar Rp. 1.848,8 Triliyun dan telah melibatkan sebanyak 9.800 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) telah berhasil membangun sebanyak 74,36% infrastruktur transportasi, 10% infrastruktur air bersih dan sanitasi, 9,95% infrastruktur peningkatan produksi pertanian, 1,43% infrastruktur pendidikan dan 2,36% infrastruktur kesehatan. Namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 masih cukup tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah meluncurkan PNPM-PISEW II/*Rural Infrastructure for Social and Economic Activities* (RISE II) pada tanggal 12-13 Agustus 2014 di Jakarta dalam rangka mendorong percepatan program penanggulangan kemiskinan dengan program strategis yang ingin dilaksanakan adalah: (1) Pemerataan pembangunan melalui penyediaan BLM Kecamatan guna pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di desa; (2) Pertumbuhan ekonomi melalui KSK guna mendorong pertumbuhan wilayah dengan alokasi 2 Miliar per kecamatan; (3) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penerapan *Quick Wins* di beberapa lokasi tertentu dengan alokasi sebesar 2-3 Miliar. KSK lebih difokuskan sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah agar kawasan-kawasan tersebut memiliki nilai tambah melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari 35 kabupaten pelaksana lanjutan dari PNPM-PISEW jilid II ini yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 26 Miliar untuk 10 kecamatan. Sedangkan KSK dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu Jaro, Muara Uya dan Haruai yang mendapatkan dana masing-masing 2 Miliar untuk program pengembangan sosial ekonomi guna menghidupkan kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan. Pemilihan kawasan ini sebagai kawasan strategis karena mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Kawasan Strategis ini telah dilegalisasi berdasarkan Perda Nomor 19 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tabalong pada pasal 38 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: c. Kawasan perkebunan dan peternakan sapi, meliputi Kecamatan Jaro, Muara Uya, dan Haruai”. Sebagai kawasan strategis, ketiga kecamatan ini memiliki potensi dan prospek yang bisa dikembangkan, seperti karet dan sapi untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Melalui PNPM-PISEW, perkembangan komoditi unggulan di KSK Tabalong mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2009-2015, dimana terdapat peningkatan luas lahan tanam perkebunan karet sebesar 19.228 ha menjadi 20.787 ha, peningkatan produksi sebesar 13.539 ton/tahun menjadi 20.268 ton/tahun, dan peningkatan produktifitas sebesar 0,704 ton/ha/tahun menjadi 1,1 ton/ha/tahun. Sedangkan komoditas sapi juga mengalami peningkatan populasi ternak sebesar 3.248 ekor/tahun menjadi 3.355 ekor/tahun. Peningkatan ini tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Tabalong yang cukup strategis dalam menunjang keberhasilan program PNPM-PISEW di kawasan tersebut melalui beberapa kebijakan yang diterapkan, antara lain: 1) Diterbitkannya Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 yang di dalamnya termuat bahwa wilayah Kecamatan Jaro, Muara Uya, dan Haruai termasuk wilayah KSK dengan komoditas unggulan karet dan sapi. 2) Diterbitkannya SK Bupati Tabalong

Nomor: B. /Bppd/03/2011 tentang Tim Pengelola Promosi KSK. 3) Diterbitkannya legalitas pelaku program dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, seperti SK Tim Koordinasi, SK Tim Sekretariat, SK Tim Pengelola KSK, SK Pokja Kecamatan, SK Fasilitator Desa, SK PJOK KSK, SK Tim Seleksi dan SK Tim Penilai dalam memfasilitasi kegiatan PNPM-PISEW. 4) Adanya ketersediaan anggaran Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dari berbagai instansi seperti, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan. 5) Adanya *activity sharing* dari beberapa SKPD yang mendukung kegiatan di kawasan strategis. 6) Adanya ketersediaan lokasi kegiatan oleh masyarakat desa dalam bentuk hibah lahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Jangka Menengah Pemberdayaan Sosial Ekonomi – Kawasan Strategis Kabupaten (PJM PSE- KSK) Kabupaten Tabalong tahun 2013-2017, ditargetkan kenaikan rata-rata produksi komoditas karet sebesar 10% per tahun dan kenaikan rata-rata komoditas sapi sebesar 4% per tahun. Guna merealisasikan target capaian tersebut, perlu strategi kebijakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Tentunya pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong perlu dievaluasi untuk menilai sejauh mana tingkat ketercapaian program tersebut terhadap pengurangan kemiskinan dan pengembangan KSK.

Evaluasi pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari proses yang dilakukan setelah perumusan program/kebijakan, implementasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut. Kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2009) ditetapkan menjadi tolok ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Kriteria tersebut meliputi : efektifitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). *Dalam penelitian disertasi ini peneliti menetapkan fokus pada efektivitas pelaksanaan program, yang didalamnya telah mencakup 5 indikator utama yaitu transparansi dan akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, kesetaraan gender, dan keberlanjutan program (Indikator Kinerja Program PNPM-PISEW menurut UU No.26/2007).*

Penelitian ini fokus pada upaya untuk mengevaluasi faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan program PNPM-PISEW tersebut dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong?

METODE

Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong, maka peneliti menggunakan metode observasi lapangan, wawancara mendalam maupun wawancara berpedoman dengan pihak terkait, study dokumenter dan Focus Group Discussion (FGD). Selanjutnya semua data yang diperoleh akan dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabalong. Karena Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Indonesia yang ditunjuk sebagai pelaksana lanjutan Program PNPM-PISEW yang pada tahun anggaran 2013/2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 26 miliar untuk 10 kecamatan. Pelaksanaan Program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong dilaksanakan di tiga Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yaitu di Kecamatan Jaro, Muara Uya dan Haruai yang masing-masing mendapatkan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk program pengembangan sosial ekonomi guna menghidupkan kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan. Pemilihan kawasan ini sebagai kawasan strategis karena mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketiga kawasan ini memiliki komoditi yang potensial dikembangkan, seperti karet dan ternak sapi untuk mendongkrak ekonomi lokal. Oleh karena itu, yang menjadi lokasi penelitian adalah 3 (Tiga) Kecamatan yang termasuk

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Tabalong yaitu Kecamatan Jaro, Muara Uya dan Haruai.

TEORI

Dunn (1999) menyamakan istilah evaluasi dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja kebijakan, khususnya evaluasi kebijakan publik.

Maarse (Sunggono, 1994), yaitu: (1) isi dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan; (2) tingkat informasi dari pelaku yang terlibat; (3) banyaknya dukungan bagi kebijakan yang diimplementasikan; dan (4) pembagian potensi dan peran dalam proses implementasi. Untuk memahami lebih lanjut keempat kondisi tersebut di atas, akan dijelaskan secara singkat dalam uraian ini: (1) Isi Kebijakan, isi kebijakan dapat mempersulit implementasi dalam hal berupa: (a) Evaluasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada; (b) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilakukan; (c) Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan. (2) Informasi, implementasi suatu kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan peranannya dengan baik. Informasi ini dalam kenyataannya justru sering tidak ada. Dalam keadaan yang demikian itu, kondisi para pelaksana sering kurang diketahui oleh pihak atasan. Informasi ini juga berkaitan dengan obyek-obyek kebijakan, misalnya masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan kepada pelaksana (pemerintah), atau tentang kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi. (3) Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapat dukungan yang cukup untuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dapat dilihat dari cara pelaksana dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. Selanjutnya, mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai obyek; atau dapat juga terjadi apabila masyarakat merasa terikat kepada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang hangs dipenuhi seperti yang diinginkan oleh suatu peraturan yang ada. (4) Pembagian potensi, pembagian potensi di antara para pelaku (aktor) yang terlibat dapat mempengaruhi evaluasi kebijakan. Hal ini misalnya berkaitan dengan diferensiasi dari tugas dan wewenang. Di samping itu juga terjadinya pengendalian yang terdesentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif. Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987), yakni: 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi, 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

PEMBAHASAN

Sinergisitas Program dan Kegiatan

Satu hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pemberdayaan masyarakat adalah pentingnya upaya untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan yang telah ada sehingga masing-masing program dapat ditentukan kejelasan segmentasi dan posisinya dalam kerangka makro program pemberdayaan masyarakat di satu wilayah atau kawasan tertentu. Hal ini penting agar, baik aparatur pemerintah, konsultan, fasilitator, maupun masyarakat, mengetahui secara tepat apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mereka perlukan dari setiap program pemberdayaan yang ada.

Sangat penting yang juga terkait dengan pelaksanaan program PNPM-PISEW di KSK Tabalong adalah sinkronisasi antar kegiatan dengan kebutuhan masyarakat kelompok sasaran. Masih adanya penilaian kurang baik terhadap kemanfaatan program maupun masih adanya penilaian bahwa program kurang transparan dan kurang adil, sesungguhnya menggambarkan lemahnya sinergisitas antara kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal demikian, agar para pelaksana program dapat menciptakan sinergisitas yang lebih baik, diperlukan aparatur pelaksana program yang makin berkualitas.

Untuk membangun kinerja aparatur yang makin berkualitas, pengelola program PNPM-PISEW melakukan pelatihan dan pengukuran kinerja aparatur pelaksana program setiap enam bulan sekali. Aspek-aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja aparatur pelaksana program, meliputi: 1) Proses Pelaksanaan Program mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. 2) Aspek Keuangan, merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yang meliputi anggaran yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program. 3) Transparansi, pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima program dan 4) Akuntabilitas, hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan ke publik.

Tantangan dan persoalan ke depan yang perlu dijaga keberlanjutannya oleh seluruh pelaku PNPM-PISEW di setiap tingkatan: di tingkat provinsi adalah Pembentukan tim koordinasi Provinsi akibat Pemberlakuan PP 41 tentang organisasi perangkat daerah mengakibatkan beberapa anggota di tim koordinasi dan sekretariat, pindah ke jabatan lain/instansi lain sehingga diperlukan Revitalisasi SK Tim Koordinasi dan SK Tim Sekretariat.

Di aspek Perencanaan dan pelaksanaan fisik akibat realisasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan fisik belum optimal maka perlunya seluruh tim koordinator dan sekretariat melakukan monev dan upaya percepatan tahapan kegiatan di setiap tingkatan dengan meningkatkan intensitas pertemuan rutin.

Kesulitan pembentukan di tingkat kabupaten adalah karena tahapan Pembentukan tim koordinasi Kabupaten akibat pemberlakuan PP 41 tentang organisasi perangkat daerah mengakibatkan beberapa anggota di tim koordinasi dan sekretariat pindah ke jabatan lain/instansi lain maka diperlukan revitalisasi SK Tim Koordinasi dan SK Tim Sekretariat dan perlu asistensi khusus dan pelatihan khusus kepada anggota tim secara formal maupun informal.

Aspek lain yang terkait fungsi pengendalian penyusunan indikator misi PSE jangka menengah kabupaten dengan keterbatasan data dan perlu waktu lama dalam penyediaan sumber data dan analisis di setiap SKPD dalam penyusunan misi PSE kabupaten maka diperlukan dukungan data dari tim koordinasi dan sekretariat. Sentralisasi data terkait program pemberdayaan disetiap kabupaten.

Tak kalah penting juga penyediaan alokasi dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) kabupaten diperlukan transparansi pengelolaan untuk mendukung tahapan kegiatan PISEW. Praktek pengendalian Bappeda dalam mendistribusikan anggaran PAP antar SKPD

yang terkait PISEW bahkan sampai Pokja sulit di jalankan dengan baik. Untuk itu, diperlukan asistensi terus menerus untuk mengurangi ego sektoral dan mengedepankan ajuan dana bersama secara sinergis. Sedangkan di tingkat kecamatan aparat kelompok kerja terkait dengan pencairan dana yang ditandai perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan dana oleh masyarakat. Maka diwajibkan adanya dukungan dari PPK dan Satker agar dicapai tertib administrasi. Sedangkan di tingkat desa persoalan insentif fasilitator desa belum seluruh kabupaten melakukan pembayaran FD tepat waktu akibat dana belum cair maka diperlukan dukungan Tim koordinasi dan sekretariat untuk dibayar tepat waktu agar kinerja FD lebih produktif.

Rendahnya Kapasitas Sumberdaya Masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat, terutama masyarakat miskin yang dijadikan sebagai kelompok sasaran program pemberdayaan, menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan suatu program pemberdayaan. Keterbatasan kapasitas sumberdaya masyarakat ini dalam kenyataan di lapangan telah menyebabkan kurang efektifnya setiap tahap kegiatan, sulitnya melakukan komunikasi dan sosialisasi program, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efektifnya partisipasi dari mereka.

Dalam pelaksanaan program PNPM-PISEW di KSK Tabalong, kendala rendahnya kapasitas sumberdaya masyarakat ini dapat dilihat pada munculnya tanggapan dari kelompok tertentu bahwa program belum menyentuh kepentingan mereka dan masih adanya sikap tak-acuh dalam usaha pelestarian program yang sesungguhnya untuk kepentingan mereka. Untuk itu, guna meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat, maka pada program PNPM-PISEW disediakan agenda pelatihan untuk kelompok masyarakat sasaran, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai tahap pelestarian program.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kabupaten Tabalong ternyata adalah masih lemahnya sinergisitas program dan rendahnya kemampuan masyarakat.

Saran

Untuk itu disarankan agar meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PNPM-PISEW di KSK Tabalong dan program pemberdayaan masyarakat, maka peran serta masyarakat pada semua level kegiatan, khususnya perempuan, dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Perlunya dibentuk jaringan kemitraan antara pemerintah daerah, fasilitator kegiatan dari masyarakat dan kelompok sasaran, serta seluruh stakeholder program. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan hendaknya lebih ditingkatkan dimana masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai obyek (penerima bantuan sebagai warga miskin) tetapi menjadi subyek dan bahkan sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu masyarakat hendaknya dilibatkan dalam keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev dan penerimaan manfaat. Pemerintah daerah hendaknya segera melakukan pendataan secara jelas dan terukur tentang kriteria kemiskinan, sehingga setiap kebijakan program penanggulangan kemiskinan mempunyai sasaran dan target yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W.N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Martani dan Lubis. (1987). *Manajemen Modern*. Rineka Cipta: Jakarta.

Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

- .(2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan.* PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik.* Sinar Grafika: Jakarta.